



## LAPORAN KEGIATAN

Rapat Koordinasi Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); Pembaharuan Peta Status Terkini dan *Quo Vadis KPH* di Provinsi Sumatera Selatan.



# Laporan

## Rapat Koordinasi Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Sumatera Selatan; Pembaharuan Peta Status Terkini KPH dan Quo Vadis.

### Tim Penyusun

---

Penyusun : Haryanto R. Putro, Yun Yudiarti, Muhammad Ardisson, Dudy Nugroho  
Kontributor : Lulu Yuningsih, Tumbur Marpaung, Mohammad Sidiq, Berthold Haasler  
Editor : Nyimas Wardah  
Desain cover : GIZ BIOCLIME  
Foto Sampul : Rapat Koordinasi Kepala KPH Sumatera Selatan

**ISBN: 978-602-74164-6-8**

© Tim Penyusun, 2016

Dokumen ini dapat diperoleh di:

GIZ Bioclimate Project, Sumatera Selatan

Jl. Jendral Sudirman Km 3,5 No 2837 Palembang 30129

Telp/fax: +62 (0) 711-353176 / +62 (0) 711-353176

<http://gizbioclimate.org>

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Kol. H. Burlian Km 6,5 Pundi Kayu Palembang

Telp/fax: +62 (0) 711-411476 / +62 (0) 711-411479

<http://www.dishutsumsel.go.id>

Forum KPH Sumatera Selatan

Jl. Jendral Sudirman Km 3,5 No 2837 Palembang 30129

Telp/fax: +62 (0) 711-353176 / +62 (0) 711-353176

## DAFTAR ISTILAH

BIOCLIME	Biodiversity and Climate Change
BPDAS	Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai
BPKH	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BPHP	Balai Pengelolaan Hutan Produksi
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GIS	Geographic Information System
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
JDS	Jaringan Data Spasial Daerah
JDSK	Jaringan Data Spasial Kehutanan
Kec	Kecamatan
Kab	Kabupaten
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MRV	Monitoring Reporting Verification
Muba	Musi Banyuasin
Mura	Musi Rawas
Muratara	Musi Rawas Utara
OKI	Ogan Komering Ilir
OKU	Ogan Komering Ulur
Ortala	Organisasi dan Tata Laksana
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Prov	Provinsi
Rakor	Rapar Koordinasi
RPHJP	Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Sapras	Sarana dan Prasarana
SDM	Sumber Daya Manusia
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SOP	Standard Operating Procedure
Setda	Sekretaris Daerah
SumSel	Sumatera Selatan

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>- 1 -</b>
1.1. Latar Belakang .....	- 1 -
1.2. Tujuan.....	- 1 -
1.3. Keluaran.....	- 2 -
<b>BAB II. HASIL RAPAT KOORDINASI KPH .....</b>	<b>- 3 -</b>
2.1. Metoda Rapat Koordinasi.....	- 3 -
2.2. Hasil Kegiatan.....	- 5 -
A. Pengantar Rapat Koordinasi.....	- 5 -
B. Diskusi Terfokus.....	- 6 -
B.1 Kelompok KPHP.....	- 7 -
B.2 Kelompok KPHL.....	- 11 -
C. Resume Kondisi Terkini KPH dan Rencana Kedepan .....	- 14 -
D. Organisasi KPH ke Depan.....	- 17 -
<b>BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>- 19 -</b>
3.1. Kesimpulan dari Rapat Koordinasi .....	- 19 -
3.2. Saran.....	- 19 -
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>20</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Agenda dan tata waktu kegiatan hari pertama rapat koordinasi KPH se Sumatera Selatan.....	- 3 -
Tabel 2 Agenda dan tata waktu kegiatan hari kedua rapat koordinasi KPH se Sumatera Selatan.....	- 4 -
Tabel 3 Matrik hasil Diskusi Terfokus masing-masing tipologi KPH se Sumatera Selatan..	- 6 -
Tabel 4 Peserta diskusi terfokus pada KPHP se Sumatera Selatan.....	- 8 -
Tabel 5 Daftar Peserta Diskusi Terfokus pada Kelompok KPHL.....	- 11 -
Tabel 6 Rangkuman Permasalahan KPHL di Sumatera Selatan.....	- 12 -
Tabel 7 Kondisi terkini KPH se Sumatera Selatan berdasarkan tipologi .....	- 14 -
Tabel 8 Klasifikasi KPH Se Sumatera Selatan.....	- 16 -

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peserta dan fasilitator Diskusi Terfokus pada kelompok KPHP.....	- 8 -
Gambar 2 Peserta dan fasilitator Diskusi Terfokus pada kelompok KPHL.....	- 11 -

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan kebijakan penting yang harus dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan hutan di Indonesia. Pengelolaan di tingkat tapak dengan luasan terukur diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengembalikan eksistensi kawasan hutan berdasarkan fungsinya. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Kementerian Kehutanan telah mengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan melalui terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14), dan ditindaklanjuti dengan kebijakan pembentukan 120 unit KPH Model di seluruh Indonesia melalui mekanisme pendanaan dari Bappenas.

Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.76/Menhut-II/2010 tgl. 10 Februari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan seluas  $\pm$  2.558.407 Ha yang terdiri dari: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 10 Unit seluas  $\pm$  498.946 Ha dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 14 Unit seluas  $\pm$  2.059.461 Ha.

Perkembangan pembentukan kelembagaan KPH di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Desember 2015, telah terbentuk 21 (Dua Puluh Satu) unit kelembagaan KPH dari 24 (Dua Puluh Empat) unit yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dimana 6 (Enam) unit diantaranya telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai KPH Model yaitu: (1) KPHL Model Unit I Banyuasin, (2) KPHP Model Unit III Lalan Mangsang Mendis, (3) KPHP Model Unit IV Meranti, (4) KPHP Model Unit VI Lakitan, (5) KPHP Model Unit V Rawas dan (6) KPHP Model Unit XIV Benakat-Bukit Cogong.

Operasionalisasi ke-21 unit KPHP dan KPHL yang telah terbentuk di Provinsi Sumatera Selatan tersebut belum seperti yang diharapkan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selaku koordinator dan fasilitator pembangunan KPH di Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk menemukan solusi dari permasalahan ini.

Maka, dalam rangka mendukung upaya percepatan operasionalisasi KPH yang telah dilaksanakan oleh Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Rapat Koordinasi Kepala KPHP dan KPHL se Provinsi Sumatera Selatan.

## 1.2. Tujuan

Menumbuhkan sigergitas dan rasa kebersamaan diantara para kepala KPHP/KPHL untuk saling membantu dan berbagi informasi, pengetahuan serta pengalaman dalam mengembangkan unit KPHP/KPHL yang dia pimpin dan membangun jejaring kerja diantara para kepala KPHP/KPHL dengan pihak-pihak NGO yang berminat untuk turut serta membangun KPHP/KPHL di Provinsi Sumatera Selatan

Beberapa tujuan khusus yaitu:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi dalam memetakan kondisi terkini KPH di Sumatera Selatan (SWOT analysis) guna mendapatkan pola permasalahan/tantangan dan alternative solusi (termasuk 4 pilar utama: kebijakan, infrastruktur, SDM dan system)
2. Sinergi antara RPHJP dengan rencana bisnis KPH
3. Memetakan status quo dan *quo vadis* dari KPH sesuai dengan RPHJP, Rencana Bisnis dan organisasi tata laksana (ortala)
4. Sosialisasi JDSK dan Website KPH
5. Diskusi arah kelembagaan KPH setelah implementasi UU 23/2014

### **1.3. Keluaran**

Beberapa keluaran yang diharapkan dari rapat koordinasi ini antara lain:

1. Matrik pemetaan status terkini seluruh KPH di Sumatera Selatan
2. Matrik pemetaan keterhubungan RPHJP dengan rencana bisnis KPH
3. Pemetaan status quo dan quo vadis KPH
4. Sosialisasi JDSK dan komitmen dari KPH untuk implementasi
5. Sosialisasi Ortala dan system yang bisa mendukung operasional RPHJP & Rencana Bisnis KPH

## BAB II. HASIL RAPAT KOORDINASI KPH

### 2.1. Metoda Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi KPH dilaksanakan dalam tiga hari pada tanggal 25-27 Mei 2016 bertempat di Hotel Horizon Ultima, Jl Jendral Sudirman Palembang. Rapat Koordinasi diikuti oleh semua pihak KPH, Dinas Kehutanan Provinsi, Bappeda Provinsi, BPHP, BPKH, BPDAS selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian, Perguruan Tinggi, GIZ BIOCLIME, LAMAI dan pendamping KPH. Daftar peserta Rakor dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Kegiatan Rakor ini merupakan kegiatan lanjutan dari beberapa kegiatan kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi dan GIZ Bioclime yang telah dilaksanakan dari tahun 2014. Kegiatan hari pertama pada tanggal 25 Mei 2016 diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan oleh Bapak Ir. Panji dilanjutkan dengan diskusi perkembangan kondisi terkini KPH di Sumatera Selatan. Dalam rangka Sinergi antar KPH untuk menumbuh kembangkan sharing komunikasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui jaringan sistem kerja di Sumatera Selatan. Agenda kegiatan hari pertama tanggal 25 Mei 2016 disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1 Agenda dan tata waktu kegiatan hari pertama rapat koordinasi KPH se Sumatera Selatan

Waktu	Agenda
13.00 – 18.00	Daftar ulang peserta
18.00 – 19.30	Makan malam
19.49 – 19.53	Menyanyikan lagu Indonesia Raya
19.53 – 19.54	Pembacaan doa
19.54 – 19.57	Laporan kemajuan kegiatan KPH se Sumatera Selatan
19.57 – 20.15	Keynote speaker tentang Kondisi terkini, Rencana dan Misi ke depan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Sumatera Selatan, sekaligus pembukaan acara rapat koordinasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bpk Ir Pandji
20.15 – 21.50	Diskusi pada sesi pengantar

Kegiatan diskusi pengantar KPH dipandu oleh fasilitator Bapak Haryanto R Putro. Peserta utama Rakor KPH adalah kepala KPH dan UPT Pusat yang diberikan mandat untuk mendampingi dan memfasilitasi operasionalisasi KPH, Dinas Kehutanan Provinsi, Pendamping KPH, GIZ Bioclime serta perguruan tinggi. UPT Pusat yaitu BPKH, BPDAS-HL dan BPHP diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat dan mandat yang diembannya. Selain itu juga ketua Forum KPH se Sumatera Selatan berkesempatan untuk memamparkan tentang kondisi KPH di Sumatera Selatan. Tidak kalah pentingnya adalah pendapat opini dari beberapa Kepala KPH, pendamping dan perguruan tinggi sebagai bahan utama dalam diskusi FGD pada hari kedua.

Pelaksanaan kegiatan pada hari kedua (Kamis, 26 Mei 2016) merupakan inti dari pelaksanaan Rakor dengan fokus kegiatan pada dua agenda utama yakni (1) sharing pengalaman dan pembelajaran dari implementasi bisnis KPH yaitu dari KPHP Benakat Bukit Cogong, KPHP Lakitan dan KPHP Meranti dan (2) diskusi terfokus dan presentasi hasil diskusi. Kegiatan dipandu oleh



moderator Bapak Ir. Haryanto, M.S dan diskusi terfokus difasilitasi oleh Ibu Lulu Yuningsih (Universitas Muhammadiyah Palembang) dan Ibu Yun Yudiarti (Institut Pertanian Bogor). Kegiatan hari kedua secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2 Agenda dan tata waktu kegiatan hari kedua rapat koordinasi KPH se Sumatera Selatan

Waktu	Agenda
08.00 – 09.00	<b>Sesi 2: Kondisi saat ini dan kapasitas dari KPH di Sumatera Selatan</b>
08.50 – 09.15	Pengenalan Forum KPH Sumatera Selatan dan kemitraan KPHP Benakat Bukit Cogong dalam pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) madu oleh Neneng Heliana S.Hut. MS (Kepala KPH Benakat Bukit Cogong) dan tentang bagaimana forum KPH diinisiasi oleh para kepala KPH bekerjasama dengan Bioclimate.
09.15 – 09.40	Kemitraan KPHP Lakitan dengan masyarakat dalam pengembangan kopi organik selangit oleh Ir. Edy Cahyono, M.S (Kepala KPH Lakitan) dan tentang bagaimana bisnis KPH Lakitan dibangun dengan menetapkan produk unggulan, pengemasan, peningkatan kapasitas masyarakat dan jaringan pasar
09.40 – 10.00	Kemitraan KPHP Meranti dalam Pengelolaan Wilayah Tertentu (WTT) dengan PT. Pinago oleh Wan Kamil, S.Hut (Kepala KPH Meranti), dan tentang bagaimana kerjasama KPH Meranti dengan perusahaan untuk membangun bisnis KPH terutama di wilayah tertentu
10.00 – 10.15	Coffee break
10.15 – 12.00	<b>Diskusi Terfokus-1: Evaluasi dan analisa SWOT kondisi KPH di Sumatera Selatan</b> a. Kelompok Hutan Produksi (KPHP) difasilitasi oleh Ibu Yun Yudiarti b. Kelompok Hutan Lindung (KPHL) difasilitasi oleh Ibu Lulu Yuningsih
12.00 – 13.00	Lunch break
13.00 – 16.00	<b>Diskusi Terfokus-2: Harapan yang sinergi dengan RPHJP dan Rencana Bisnis Plan KPH</b> a. Kelompok Hutan Produksi (KPHP) difasilitasi oleh Ibu Yun Yudiarti b. Kelompok Hutan Lindung (KPHL) difasilitasi oleh Ibu Lulu Yuningsih
16.00 – 16.30	Presentasi Kelompok a. Kelompok Hutan Produksi (KPHP) diwakili oleh Bpk Junaidi b. Kelompok Hutan Lindung (KPHL) diwakili oleh Bpk Udi
16.30 – 17.00	Resume

Pelaksanaan kegiatan pada hari ketiga (Jumat, 26 Mei 2016) memberikan alternatif solusi yang dihadapi oleh KPH untuk menyelesaikan permasalahan dari sudut pengelolaan atau manajemen serta menjawab sistem komunikasi yang bisa dilakukan untuk menjawab atau berbagi pengalaman terkait masalah yang dihadapi oleh KPH dan publikasi hasil kegiatan dari setiap KPH maupun dari dinas. Lebih lanjut, sistem Jaringan Data Spasial Kehutanan (JDSK) dengan website KPH bisa digabungkan menjadi satu alat untuk aplikasi Pemantauan Evaluasi Pelaporan (PEP) atau dikenal juga dengan Monitoring Reporting Verification.

Sosialisasi draft kelembagaan yang baru mengenai organisasi dan tata laksana (ortala) menjadi satu bagian kegiatan untuk memberikan gambaran kepada peserta mengenai desain yang sudah

ada guna mendukung implementasi UU 23/2014 yang akan dimulai pada bulan Oktober 2016. Kegiatan hari ketiga secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3 Agenda dan tata waktu kegiatan hari ketiga rapat koordinasi KPH se Sumatera Selatan

Waktu	Agenda
08.30 – 09.30	<p><b>Sesi 3: Sosialisasi Jaringan Data Spasial Kehutanan (JDSK) Sumatera Selatan dan website Frum KPH Sumsel</b></p> <p>a. Dukungan JDSK untuk KPH di Sumatera Selatan dari tahun 2014–2016 dan Rencana Kolaborasi bersama KPH oleh Bapak Bonaventura Firman</p> <p>b. Website Forum KPH Sumatera Selatan sebagai media komunikasi dan publikasi oleh Bapak Ardisson</p>
09.30 – 10.00	Diskusi JDSK dan Website Forum KPH
10.00 – 10.15	Coffee break
10.15 – 11.00	Sosialisasi Draft Kelembagaan Dinas Kehutanan dengan UU 23/2014
11.00 – 11.30	Diskusi draft kelembagaan
11.30 – 11.40	Penutupan dan foto bersama

## 2.2. Hasil Kegiatan

### A. Pengantar Rapat Koordinasi

Beberapa catatan penting dalam diskusi kelompok pada hari kedua tanggal 26 Mei 2016 dijelaskan secara spesifik yang menjadi modal informasi untuk mengembangkan analisa dan memperbaharui kondisi terkini dari KPH di Sumatera Selatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting KPH yang ada di Sumatera Selatan terdiri dari 19 KPH yang terbagi menjadi 3 tipologi berdasarkan ada tidaknya RPHJP.
  - a. 5 KPH telah memiliki RPHJP dan Rencana Bisnis dan sedang diimplementasikan.
  - b. 7 KPH sedang proses untuk mendapatkan pengesahan RPHJP
  - c. 7 KPH belum memiliki RPHJP
2. Permasalahan umum yang dihadapi oleh KPH, secara garis besar terbagi menjadi 4 yaitu Kebakaran Hutan dan Lahan, Perambahan, Illegal Logging dan Konflik Tenurial.
3. Kebijakan KPH di tingkat Pusat sudah bagus, tetapi implementasi dilapangan terutama di Sumatera Selatan baik di tingkat tapak (KPH) maupun provinsi masih mengalami banyak kendala.
4. KPH dapat operasional jika seorang Kepala KPH mau menjadi seorang interpreneur. Dalam pengembangan bisnisnya KPH Produksi dan KPH Lindung harus memiliki orientasi bisnis yang berbeda. KPHP diarahkan untuk produksi kayu dan hasil hutan lainnya, sedangkan KPHL diarahkan pada HHBK dan Jasa Lingkungan.
5. Tugas BPDAS HL Musi adalah memberi bimbingan teknis, fasilitasi dan pendampingan terutama bidang pembibitan dan penanaman kepada KPH tetapi yang memangku wilayah adalah KPH itu sendiri. Penanaman dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan.
6. Tugas BPMP adalah memfasilitasi sarana prasarana yang akan dibangun di KPH dengan berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala KPH tentang kebutuhannya, dan syarat nya sarpras tersebut harus dibangun harus berada di lokasi/ dalam kawasan.

7. RPHJP yang telah disusun oleh KPH dapat direview sesuai dengan kondisi dan realitas di tingkat tapak
8. KPH memiliki amanat untuk mengelola hutan di tingkat tapak, dengan adanya perubahan dan akan diimplementasikannya UU 23 tahun 2014, para kepala KPH ingin mendengar dan mendapat penjelasan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel akan dibawa kemana KPH. Karena dari 5 KPH yang dianggap telah operasional justru ada keraguan apakah KPH yang ada akan digabung/merjer atau tetap dengan 19 KPH seperti saat ini.
9. KPH dituntut menjadi interpreter, padahal langkah utama/tugas utama KPH adalah menata tata kelola hutan baru tahap berikutnya adalah mengembangkan bisnis karena dituntut untuk mandiri. Tetapi ketika KPH akan bergerak menuju mandiri SDM dan regulasi untuk mengelola KPH tidak mendukung, dalam arti lain KPH tidak diberikan keleluasan.
10. Membangun KPH menuju KPH Mandiri diperlukan komitmen dari para pihak, regulasi, konstruksi organisasi yang tidak mengekang dan profesionalisme. Isu organisasi KPH menjadi isu penting untuk kemandirian dan keberlanjutan KPH ke depan.

## B. Diskusi Terfokus

Diskusi terfokus bertujuan untuk menggali kondisi existing (sarana prasarana, permasalahan, sumberdaya manusia yang dimiliki, struktur organisasi) yang dimiliki oleh KPH. Pada diskusi terfokus terbagi menjadi 2 yaitu kelompok KPHL dan KPHP. Masing-masing kelompok kemudian dibagi menjadi 3 tipologi yaitu:

1. Tipologi 1 yaitu KPH yang telah memiliki RPHJP dan Rencana Bisnis dan telah diimplementasikan (KPH yang telah operasional).
2. Tipologi 2 yaitu KPH yang telah menyusun RPHJP dan Rencana Bisnis, tetapi masih proses untuk mendapat pengesahan dari pejabat terkait.
3. Tipologi 3 yaitu KPH yang baru dibentuk, baik yang telah mendapat fasilitasi maupun yang belum mendapat fasilitasi untuk menyusun RPHJP.

Tabel 3 Matrik hasil diskusi terfokus masing-masing tipologi KPH se Sumatera Selatan

Deskripsi	Tipologi KPHP		
	Tipologi 1	Tipologi 2	Tipologi 3
Definisi	KPH sudah operasional yaitu telah memiliki dokumen RPHJP dan Rencana Bisnis serta sebagian program dan kegiatan telah dilaksanakan). KPHP di Sumatera Selatan yang masuk dalam tipologi ini adalah KPHP Rawas, KPHP Meranti, KPHP Lakitan, KPHP Benakat Bukit Cogong dan KPHP Lalan Mendis .	KPH setengah operasional yaitu KPH yang hingga saat ini telah menyusun RPHJP, tetapi masih proses untuk mendapat pengesahan. Ada 2 KPHP dan 5 KPHL yang masuk dalam kategori yaitu KPHP Subanjeriji-Martapura dan KPHP Unit II Lalan Sembilang, KPHL Bayuasin , KPHL Dempo, KPHL Ogan Ulu, KPHL Bukit Nanti OKU, KPHL Peraduan Gistang	KPH belum memiliki RPHJP. Ada lima KPHP dan 2 KPHL di Sumatera Selatan yang masuk dalam kategori ini. Kelima KPH tersebut yaitu KPHP Mesuji Hilir, KPHP Sungai Batang-Riding, KPHP Saka, KPHP Sungai Lumpur dan KPHP Lempuing. KPHL yang masuk tipologi ini yaitu KPHL Mekakau dan KPHL Bukit Nanti OKUS
Sarana prasarana	Sarana prasarana yang cukup terutama di	Sarana prasarana masih menyatu dengan	Sarana prasarana masih menyatu

Deskripsi	Tipologi KPHP		
	Tipologi 1	Tipologi 2	Tipologi 3
	kantor KPH diantaranya kantor KPH, Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 4, Furniture, peralatan dan perlengkapan survey	sarana prasarana yang dimiliki dinas Kabupaten	dengan sarana prasarana yang dimiliki dinas Kabupaten
SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PNS masih terbatas,</li> <li>• Ada Bantuan dari BP2SDM yaitu Bakti rimbawan sudah mulai mengisi beberapa kekosongan jabatan di KPH.</li> <li>• Pegawai kontrak yang direkrut oleh Kepala KPH untuk mendukung operasional KPH.</li> <li>• Dari segi pendidikan sudah memadai sebagian KKPH telah bergelar master dan didukung oleh staf dengan tingkat pendidikan Sarjana, SKMA, SMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PNS masih terbatas,</li> <li>• Ada Bantuan dari BP2SDM yaitu Bakti rimbawan.</li> <li>• Dari segi pendidikan sudah memadai sebagian KKPH telah bergelar master dan didukung oleh staf dengan tingkat pendidikan Sarjana, SKMA, SMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PNS masih terbatas (1-2 orang) sebagai Kepala KPH dan wakilnya.</li> <li>• Kompetensi perencanaan dan inventarisasi</li> </ul>
Program dan sumber pendanaan	APBN, APBD Provinsi, DAK dan sumber-sumber pendanaan lainnya	APBD dan APBN	APBD
Organisasi a. Struktur organisasi	Struktur organisasi ada dan telah ada SDM	Struktur organisasi ada, tetapi SDM nya belum lengkap	Belum ada struktur organisasi, kepala KPH ditunjuk oleh dinas kabupaten.
b. Sistem organisasi	Masih berbentuk SKPD dan menunggu status organisasi menurut UU 23 tahun 2014	Masih menginduk pada organisasi dinas kehutanan kabupaten	Masih menginduk pada organisasi dinas kehutanan kabupaten

Pelaksanaan diskusi terfokus dipandu oleh moderator Bpk Ir. Haryanto dan pada masing-masing kelompok KPH difasilitasi oleh seorang fasilitator. Pada Kelompok KPHP difasilitasi oleh Ibu Yun Yudiarti, S.Hut, M.Si dan kelompok KPHL difasilitasi oleh Ibu Lulu Yuningsih, S.Hut,M.Si.

### **B.1 Kelompok KPHP**

Pembagian kelompok KPH dalam kegiatan diskusi terfokus bertujuan untuk memudahkan proses diskusi antar peserta. Peserta terdiri dari kepala-kepala KPHP dan pendamping dan lembaga lainnya (**Tabel 4**) dan **Gambar 1**. Pendamping KPH adalah seseorang dan atau sekelompok orang yang bertugas untuk membantu KPH dalam menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Bisnis KPH berdasarkan data, informasi dari kondisi ekologis wilayah KPH serta sosial budaya masyarakat sekitar. Untuk memudahkan proses diskusi pada kepala KPH yang baru dalam tahap penyusunan RPHJP

(Tipologi 3) akan berdiskusi dengan dengan kepala KPH (Tiplogi 1 dan 2) untuk tukar menukar pengalaman dalam proses penyusunan RPHJP.



Gambar 1 Peserta dan fasilitator Diskusi Terfokus pada kelompok KPHP

Tabel 4 Peserta diskusi terfokus pada KPHP se Sumatera Selatan

No	Nama	Lembaga
1	Harahab	KPHP Rawas
2	Wan Kamil	KPHP Meranti
3	Endang	Pendamping KPH/UMP
4	Neneng	KPHP Benakat-Bukit Cugong
5	David	GIZ LAMAI
6	Edi Cahyono	KPHP Lakitan
7	Hendriyadi	KPHP Lempuing
8	Nur	UMP
9	Hesti Astiana	Pendamping KPH
10	Gunawan	KPHP Subanderiji-Martapura
11	Agus Mustopa	KPHP Unit II Lalan Sembilang
12	Junaidi	KPHP Unit XXIII Sungai Lumpur
13	Hotman	KPHP Lalan Mendis
14	Edi Warsa	KPHP Unit XXIV Sungai Batang-Riding
15	Jamroni	KPHP XIX Saka
16	Antaria Marsaga	KPHP Lalan Sembilang
17	Susilo	KPHP Mesuji Unit XXII
18	Devi	Pendamping KPH/UMP

#### Hasil FGD 1 : Kondisi Existing KPH

Tipologi 1 (KPH sudah operasional yaitu telah memiliki dokumen RPHJP dan Rencana Bisnis serta sebagian program dan kegiatan telah dilaksanakan). KPHP di Sumatera Selatan yang masuk dalam tipologi ini adalah KPHP Rawas, KPHP Meranti, KPHP Lakitan, KPHP Benakat Bukit Cogong.

1. Wacana perubahan struktur organisasi dan kelembagaan KPH memerlukan dukungan SDM. untuk menjadi UPTD sudah mencukupi, meskipun yang berstatus PNS masih terbatas, tetapi pegawai dari BP2SDM yaitu bakti rimbawan sudah mulai mengisi beberapa kekosongan jabatan di KPH. Selain itu juga Kepala KPH juga merekrut pegawai kontrak untuk mendukung operasional KPH. Dari segi pendidikan sudah memadai sebagian KKPH telah bergelar master dan didukung oleh staf dengan tingkat pendidikan Sarjana, SKMA, SMA.
2. Memiliki sarana prasarana yang cukup terutama di kantor KPH seperti kantor KPH, kendaraan bermotor roda 2 dan 4, furnitur, peralatan dan perlengkapan survei, sarana prasarana kantor: komputer, laptop, printer dan sarana prasarana lainnya. Tetapi sarana prasarana di tingkat resort belum ada sehingga untuk selanjutnya perlu dibangun sebagai pondok-pondok kerja bagi pegawai di tingkat resort.
3. Lima KPH yang masuk dalam tipologi ini baik kepala KPH dan atau pegawainya telah mengikuti berbagai macam jenis pelatihan, seperti GIS, remote Ssensing, resolusi konflik, perencanaan kehutanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, bendaharawan, Market Analysis and Development (MAD), kewirausahaan, pengamanan hutan, diklat enumerasi dan pelatihan lainnya.
4. Program-program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RPHJP tahun berjalan telah diimplementasikan dengan mendapat dukungan pendanaan APBN, APBD Provinsi, DAK dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
5. Kondisi saat ini organisasi tipologi KPH ini sebagian besar berbentuk SKPD yang dikepalai oleh Seorang KKPH. Untuk operasionalisasi KPH, KKPH didukung oleh KSBTU, Kepala seksi, staf fungsional dan staf-staf pendukung lainnya.
6. Berbagai program diantaranya restorasi, pengembangan HHBK, agroforestry, Demplot HTI, pemanfaatan HHBK, bimbingan teknis kebakaran, rehabilitasi lahan dan kegiatan lainnya telah diimplementasi dengan dukungan pendanaan berbagai sumber.
7. Beberapa KPH yaitu KPHP Meranti telah melakukan kerjasama dengan perusahaan sekitar seperti PT APP, PT Pinago Utama, SSM kerjasama lainnya.
8. Permasalahan umum yang hampir terjadi diseluruh KPH tipologi ini diantaranya illegal logging, illegal minning, perambahan, konflik tenurial, okupasi oleh oknum masyarakat di dalam kawasan dan sekaligus pendataan lokasinya.

Tipologi 2 (KPH setengah operasional yaitu KPH yang hingga saat ini telah menyusun RPHJP, tetapi masih proses untuk mendapat pengesahan). Ada 2 KPHP yang masuk dalam kategori yaitu KPHP Subanjeriji-Martapura dan KPHP Unit II Lalan Sembilang.

1. SDM sudah ada meski jumlahnya belum cukup dan telah mendapat bantuan BP2SDM yaitu Bakti rimbawan.
2. Struktur Organisasi yang berkembang di KPHP tipologi ini adalah Kepala KPH, Kasubag TU, Kepala Resort
3. Tingkat pendidikan pendidikan kedua kepala KPHP yang masuk dalam tipologi 2 bergelar master. Selain itu telah ada beberapa staff dengan tingkat pendidikan Sarjana, Diploma dan SKMA.
4. Kepala KPH telah dibekali dengan pelatihan untuk menyusun RPHJP. Penyusunan RPHJP dibantu oleh para pendamping dari Perguruan Tinggi Setempat yang telah memiliki sertifikasi.
5. Belum ada sarana prasarana kantor maupun kendaraan, alamat surat menyurat masih menyatu dengan Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi.

6. Telah mendapat dukungan pendanaan dari APBD untuk menyusun RPHJP dan orientasi lapangan guna menyusun RPHJP.
7. Beberapa permasalahan telah diidentifikasi beserta lokasinya sebagai dasar untuk menyusun RPHJP.

Tipologi 3 (KPH belum memiliki RPHJP). Ada lima KPHP di Sumatera Selatan yang masuk dalam kategori ini yaitu KPHP Mesuji Hilir, KPHP Sungai Batang-Riding, KPHP Saka, KPHP Sungai Lumpur dan KPHP Lempuing.

1. Sarpras masih menyatu dengan Dinas Kabupaten
2. Belum ada struktur organisasi karena hanya memiliki 1-2 org yang memiliki kompetensi sebagai perencana hutan, hukum inventarisasi potensi.
3. Struktur organisasi yang ada baru kepala KPH dan wakilnya

### **Hasil FGD 2 : Sinergi RPJP dengan rencana bisnis**

#### **Tipologi 1 (KPH sudah operasional)**

1. Kepastian status organisasi dan kelembagaan KPH ke depan. Bentuk organisasi memiliki implikasi keberlangsungan KPH ke depan sehingga harus diperjelas terutama dengan akan diberlakukannya UU 23 tahun 2014.
2. Peningkatan jumlah SDM terutama jika organisasi KPH berbentuk SKPD, tetapi jika UPTD, SDM yang ada saat ini masih cukup.
3. Peningkatan sarana prasana sampai tingkat Resort. Sarana prasarana yang ada hingga saat ini baru sarana prasarana di kantor KPH sehingga untuk mampu menjawab permasalahan di lapangan.
4. Dukungan kepastian anggaran tahun berikutnya (2017). Dukungan kepastian anggaran berkaitan dengan kepastian organisasi KPH.
5. Regulasi untuk kemitraan KPH sehingga bisa menjadi acuan bagi KPH agar dapat bermitra dengan para pihak.
6. Kontribusi perguruan tinggi di Sumatera selatan dan PT lain di Indonesia untuk melakukan riset, kajian, kegiatan magang mahasiswa di KPH.

#### **Tipologi 2 (KPH RPHJP masih proses)**

1. Perbaiki Sistem rekrutmen pegawai, ada kekawatiran karena Bakti rimbawan hanya di kontrak selama 2 tahun, maka KPH akan mulai dari nol untuk membina dan membangun kapasitas SDM KPH.
2. Penelitian tentang KPH terutama tentang konflik dan kebijakan. Karena permasalahan yang sering terjadi di KPH adalah konflik kepentingan dari para pihak baik masyarakat, politisi, aparat, perusahaan dan pihak lainnya. Penelitian kebijakan berkaitan dengan operasionalisasi KPH.
3. Dukungan para pihak : Masyarakat, aparat, polisi dan pihak-pihak lain untuk mengatasi konflik tenurial
4. Pengelolaan jangan berbasis lahan, tetapi menerapkan teknologi
5. Dukungan dan peran perguruan tinggi yang dianggap netral untuk advokasi kepada masyarakat untuk mengatasi konflik tenurial

#### **Tipologi 3 (KPH belum memiliki RPHJP)**

1. Perlu pembekalan kepada kepala KPH untuk menyusun RPHJP dari Dinas Kehutanan Provinsi
2. Perlu peta unit KPH agar bisa dipelajari dalam rangka untuk menyusun RPHJP

3. Ada transfer knowledge dari KPH-KPH yang sudah operasional kepada KPH yang baru

## ***B.2 Kelompok KPHL***

Pembagian kelompok KPH dalam kegiatan diskusi terfokus bertujuan untuk memudahkan proses diskusi antar peserta. Peserta terdiri dari kepala-kepala KPHK dan pendamping dan lembaga lainnya (**Tabel 5**) dan **Gambar 2**. Pendamping KPH adalah seseorang dan atau sekelompok orang yang bertugas untuk membantu KPH dalam menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Bisnis KPH berdasarkan data, informasi dari kondisi ekologis wilayah KPH serta sosial budaya masyarakat sekitar. Untuk memudahkan proses diskusi pada kepala KPH yang baru dalam tahap penyusunan RPHJP (Tipologi 3) akan berdiskusi dengan dengan kepala KPH (Tipologi 2) untuk tukar menukar pengalaman dalam proses penyusunan RPHJP.



Gambar 2. Peserta dan fasilitator diskusi terfokus pada kelompok KPHL

Tabel 5 Daftar Peserta Diskusi Terfokus pada Kelompok KPHL

No	Nama	Lembaga
1	Lulu Yuningsih S.Hut, M.Si	UM Palembang
2	Udi Setyawan, S.Hut, M.Si	KPHL Banyuasin
3	Heety Dian Yunita, S.Hut	KPHL Dempo
4	Afrizal, S.Hut	KPHL Bukit Nanti OKU
5	Ketut Heriyanto ST, MM	KPHL Bukit Nanti OKUS
6	Agust Dipa Candra, S.Si MM	KPHL Mekakau
7	Doni Kumaini, SHut MM	KPHL Peraduan Gistang
8	S. Anang Wahyudi	KPHL Ogan Ulu
9	Noril Milantara, S.Hut, M.Si	Um Palembang
10	Atep Edi Hikmana	BPKH
11	Jun Harbi, S.Hut, M.Si	UM Palembang
12	Dwi Oktaria	Bioclimate
13	Mita Ramayati	Lamai CCROM IPB



## TIPOLOGI KPHL DI SUMATERA SELATAN

- A. Tipologi- 2 untuk KPHL di Sumatera Selatan hingga saat ini belum ada yang masuk dalam kategori 1, karena KPHL Banyuasin masih menunggu proses pengesahan RPHJP nya.
- B. Tipologi-2 ( KPHL- Dempo, Ogan Ulu, Bukit Nanti OKU, Peraduan Gistang, KPHL Banyuasin).  
Diantara KPHL yang masuk kategori ini KPHL Banyuasin merupakan KPHL yang sudah cukup bagus dan menuju ke operasional.  
(KPHL- Banyuasin)
1. RPHJP dalam proses pengesahan
  2. Mulai operasional sejak tahun 2015
  3. SDM sudah tersedia
    - a. KKPH- S2
    - b. K TU -S2 (Merangkap Plt.KKPHP Lalan Sembilang)
    - c. Kepala Resort (1 orang S-1 + 7 orang SMA))
    - d. Staf ( 2 orang SMA + 5 orang Bakri S-1, 2 orang Bakri SKMA)
  4. Sudah mengikuti pelatihan (7 jenis pelatihan) diantaranya adalah manajemen konflik, GIS, Biodiversity Bentang Lahan, Perencanaan KPH, HHBK, Kebakaran Hutan, CLAP

Sedangkankan KPHL yang lain yaitu KPHL- Dempo, Ogan Ulu, Bukit Nanti OKU, Peraduan Gistang

1. RPHJP Proses penyusunan
2. Mulai operasional tahun 2016
3. SDM tersedia ( 6- 11 orang)
4. Sudah mengikuti pelatihan KKPH dan lainnya

### C. Tipologi -3 (KPHL Mekakau + KPHL Bukit Nanti OKUS)

- RPHJP belum disusun
- SDM sudah tersedia (7-8 orang)

Berdasarkan diskusi dengan kepala KPHL, diidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi pada setiap KPHL. Permasalahan yang menonjol adalah kapasitas SDM, pendanaan, sarana prasarana dan regulasi yang belum mendukung untuk operasionalisasi KPH. Permasalahan yang dihadapi pada KPHL di Sumatera Selatan dapat dirinci pada **Tabel 6**.

Tabel 6 Rangkuman Permasalahan KPHL di Sumatera Selatan

Permasalahan Pokok	Uraian Masalah	Tipologi KPHL	Saran Solusi dan Harapan
Dana Operasional KPH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasional kantor tidak ada               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listrik</li> <li>• Kebersihan</li> <li>• Jaga keamanan</li> </ul> </li> <li>2. Kegiatan rutin               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patroli</li> <li>• Operasional kendaraan dan penunjangnya</li> </ul> </li> </ol>	Semua Tipologi KPHL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar ada alokasi anggaran APBN untuk operasional KPH</li> <li>2. Agar Dinas Provinsi memasukkan dalam daftar anggota rutin untuk operasional KPH</li> <li>3. Ada mediator untuk mediasi membangun kemitraan dengan pihak ke-3</li> </ol>

Permasalahan Pokok	Uraian Masalah	Tipologi KPHL	Saran Solusi dan Harapan
Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada fasilitas untuk pembangunan kantor KPH</li> <li>2. Akan difasilitasi kantor resort harus dalam kawasan hutan</li> <li>3. Kawasan hutan yang dimungkinkan dibangun kantor resort harus ada biaya ganti rugi lahan kepada masyarakat</li> <li>4. Realisasi pembangunan kantor/resor lambat</li> <li>5. Peralatan pencegahan Karhutlah</li> <li>6. Tidak ada kendaraan (roda 4 dan roda 2)</li> <li>7. Komputer, Laptop</li> </ol>	KPHL Tipologi 2 dan 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar anggaran harus jelas dan konsisten</li> <li>2. Realisasi program harus cepat</li> <li>3. Realisasi bantuan harus sesuai dengan usulan</li> <li>4. Kebijakan jangan berubah-ubah</li> <li>5. Ada mediator untuk memediasi memanfaatkan dana CSR dari pihak ke-3</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada alat penunjang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat cetak peta</li> <li>• Perlengkapan survey</li> <li>• ATK</li> </ul> </li> <li>2. Peralatan pencegahan Karhutlah</li> </ol>	KPHL Tipologi-1	
SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu ada polhut</li> <li>2. Informasi penyelenggaraan pelatihan lambat</li> <li>3. Pelatihan hanya untuk PNS/ KKPH</li> <li>4. Bakri dan non PNS tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan</li> <li>5. Jenis pelatihan yang prioritas diperlukan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Perpetaan (GIS)</li> <li>• Pemanfaatan jasa lingkungan</li> </ul> </li> </ol>	KPHL Tipologi 2 dan 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk SDM yang sudah ada dilakukan pelatihan teknis terprogram</li> <li>2. Jenis pelatihan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan</li> <li>• Pemetaan GIS</li> <li>• Pemanfaatan jasa lingkungan</li> <li>• Karlahut</li> </ul> </li> <li>3. Pelatihan tidak hanya diperuntukkan untuk PNS, melainkan harus juga non PNS (Bakti rimbawan)</li> <li>4. Mengusulkan tenaga honor Pemda menjadi bakti rimbawan</li> <li>5. Harus ada SDM yang menjabat Polhut PPNS dan pengadaan barang dan jasa</li> <li>6. Memberdayakan masyarakat untuk Pamhut</li> <li>7. Memberdayakan masyarakat dalam pengendalian karlahut</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM</li> </ol>	KPHL Tipologi-1	

Permasalahan Pokok	Uraian Masalah	Tipologi KPHL	Saran Solusi dan Harapan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polhut, tidak diberikan perhatian terhadap jenjang kefungsionalan</li> </ul>		
Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya perbedaan fasilitas antara KPHL dan KPHP</li> <li>Fasilitasi dari BPDAS untuk KPHL hanya dibatasi pada kegiatan rehabilitasi</li> <li>Belum ada kejelasan regulasi atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Turunan/ penjelasan P.39 kemitraan, P.47 tentang kerjasama</li> <li>Pemanfaatan HHBK</li> <li>Pembangunan kantor</li> </ul> </li> <li>Kegiatan yang ada di wilayah KPH atas dasar Kemitraan yang dibangun. Administrasi kerjasamanya antara BPDAS dan atau Dinas Kehutanan Provinsi dengan pihak ke-3</li> </ol>	Semua tipologi KPHL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Agar ada kepastian yang tetap dari regulasi yang ada</li> <li>Agar ada sinkronisasi antara regulasi yang dikeluarkan dari pusat dan daerah</li> <li>Perlu regulasi turunan berupa juknis penjelasan dari regulasi kemitraan</li> <li>Perlu ada regulasi terkait dengan pemanfaatan wilayah tertentu</li> </ol>
Proses pengesahan RPHJP	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk KPHL tidak difasilitasi pembahasan pra penilaian</li> </ol>	Semua tipologi KPHL	Agar ada fasilitasi pembahasan draft RPHJP dengan tim direktur KPHL dan tim penilai sebelum dilakukan penilaian

### C. Resume Kondisi Terkini KPH dan Rencana Kedepan

Hasil Diskusi Terfokus pada kedua kelompok KPHP dan KPHL kemudian dianalisa untuk mendapatkan gambaran umum dalam menjawab tujuan pelaksanaan rakor KPH Sumatera Selatan dan menjadi informasi guna merencanakan kegiatan dan program dalam peningkatan fungsi-peran KPH dalam pembangunan berkelanjutan. **Tabel 7** dibawah ini menjelaskan kondisi terkini KPH di Sumatera Selatan yang dibagi atas 3 tipologi yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel 7 Kondisi terkini KPH se Sumatera Selatan berdasarkan tipologi

Deskripsi	Tipologi KPH		
	Tipologi 1	Tipologi 2	Tipologi 3
<b>Definisi</b>	KPH sudah operasional yaitu telah memiliki dokumen RPHJP dan Rencana Bisnis serta sebagian program dan kegiatan telah dilaksanakan). KPHP di Sumatera Selatan yang	KPH setengah operasional yaitu KPH yang hingga saat ini telah menyusun RPHJP, tetapi masih proses untuk mendapat pengesahan. Ada 2	KPH belum memiliki RPHJP. Ada 5 KPHP dan 3 KPHL di Sumatera Selatan yang masuk dalam kategori ini. KPH-KPH tersebut yaitu KPHP Mesuji Hilir, KPHP Sungai Batang-Riding,

Deskripsi	Tipologi KPH		
	Tipologi 1	Tipologi 2	Tipologi 3
	masuk dalam tipologi ini adalah KPHP Rawas, KPHP Meranti, KPHP Lakitan, KPHP Benakat Bukit Cogong dan KPHP Lalan Mendis.	KPHP dan 5 KPHL yang masuk dalam kategori yaitu KPHP Subanjeriji-Martapura dan KPHP Unit II Lalan Sembilang, KPHL Dempo, KPHL Ogan Ulu, KPHL Bukit Nanti OKU, KPHL Peraduan Gisting, KPHL Banyuasin.	KPHP Saka, KPHP Sungai Lumpur dan KPHP Lempuing, KPHL Mekakau dan KPHL Bukit Nanti OKUS
<b>Sarana prasarana</b>	Sarana prasarana yang cukup terutama di kantor KPH diantaranya kantor KPH, kendaraan bermotor roda 2 dan 4, furnitur, peralatan dan perlengkapan survei	Sarana prasarana masih menyatu dengan sarana prasarana yang dimiliki dinas Kabupaten	Sarana prasarana masih menyatu dengan sarana prasarana yang dimiliki dinas Kabupaten
<b>SDM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PNS masih terbatas,</li> <li>• Ada bantuan dari BP2SDM yaitu bakti rimbawan sudah mulai mengisi beberapa kekosongan jabatan di KPH.</li> <li>• Pegawai kontrak yang direkrut oleh Kepala KPH untuk mendukung operasional KPH.</li> <li>• Dari segi pendidikan sudah memadai sebagian KKPH telah bergelar master dan didukung oleh staf dengan tingkat pendidikan Sarjana, SKMA, SMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PNS masih terbatas,</li> <li>• Ada bantuan dari BP2SDM yaitu bakti rimbawan.</li> <li>• Dari segi pendidikan sudah memadai sebagian KKPH telah bergelar master dan didukung oleh staf dengan tingkat pendidikan Sarjana, SKMA, SMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah PNS masih terbatas (1-2 orang) sebagai Kepala KPH dan wakilnya.</li> <li>• Kompetensi perencanaan dan inventarisasi</li> </ul>
<b>Program dan sumber pendanaan</b>	APBN, APBD Provinsi, DAK dan sumber-sumber pendanaan lainnya	APBD dan APBN	APBD
<b>Organisasi</b> a. Struktur organisasi	Struktur organisasi ada dan telah ada SDM	Struktur organisasi ada, tetapi SDM nya belum lengkap	Belum ada struktur organisasi, kepala KPH ditunjuk oleh Dinas kabupaten.
b. Sistem organisasi	Masih berbentuk SKPD dan menunggu status organisasi menurut UU 23 tahun 2014	Masih menginduk pada organisasi dinas kehutanan kabupaten	Masih menginduk pada organisasi dinas kehutanan kabupaten

Deskripsi	Tipologi KPH		
	Tipologi 1	Tipologi 2	Tipologi 3
<b>Status Quo</b>	Masih menunggu kepastian bentuk kelembagaan KPH di bawah Dinas Kehutanan Provinsi setelah UU 23/201	Masih menunggu pengesahan RPHJP	Masih menunggu untuk proses penyusunan RPHJP-KPH.
<b>Quo Vadis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu kepastian bentuk organisasi setelah serahterima P3D.</li> <li>• Memastikan alokasi anggaran selama masa transisi</li> <li>• Pengembangan rencana bisnis KPH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunggu kepastian bentuk organisasi setelah serahterima P3D.</li> <li>• Alokasi anggaran yang jelas untuk mengimplementasikan RPHJP yang telah disusun.</li> <li>• Penguatan kapasitas institusi dan SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas institusi dan SDM</li> <li>• Mengusulkan untuk proses pendampingan penyusunan RPHJP.</li> </ul>

Kemudian berdasarkan pendekatan 8 (delapan) tahapan menuju KPH Profesional Madiri (Dr. Ir. Agus Setyarso, M.Sc) maka unit KPHP dan KPHL yang telah terbentuk di Provinsi Sumatera Selatan secara rinci dapat di klasifikasikan sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8 Klasifikasi KPH Se Sumatera Selatan

No.	Tahapan Kegiatan	Unit KPHP/KPHL
1.	Stock Tacking : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkonsolidasikan semua data dan Informasi, melalui penafsiran citra satelit, Inventarisasi biogeofisik dan sosekbud, peta tutupan lahan dll</li> <li>• membangun kembali proses multi pihak melalui sosialisasi dan koordinasi</li> </ul>	KPHP S.Batang-Riding, KPHP S.Lumpur, KPHP Mesuji Ilir, KPHP Lempuing, KPHL Mekakau, KPHL OKU Selatan, KPHP Saka.
2.	Menyelenggarakan pertemuan multipihak/lokakarya untuk menyiapkan rencana aksi menyempurnakan RPHJP dan melaksanakan tindakan penyempurnaan RPHJP oleh Tim Multipihak (Partisipatif)	
3.	Penyempurnaan rencana manajemen KPH: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata hutan/ blocking area</li> <li>• Perumusan jenis bisnis inti KPH</li> <li>• Perumusan kemitraan bisnis; penyelenggaraan kemitraan bisnis (cbfm)</li> <li>• Merumuskan tata hubungan kerja dengan Pemprov, Pemkab, Pemkot, mitra komersial, desa dan kelompok masyarakat</li> </ul>	KPHP Subanjeriji-Martapura, KPHP Lalan Sembilang, KPHL Peraduan Gistang, KPHL Dempo, KPHL Ogan Ulu, KPHL Bukit Nanti
4.	Mempersiapkan rencana bisnis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menidentifikasi kelas perusahaan</li> <li>• Membuat prioritas kelas perusahaan</li> <li>• Merumuskan protokol kemitraan/bisnis</li> </ul>	KPHL Banyuasin
5.	Menyiapkan Safeguard:	

	Menyiapkan usaha perlindungan lingkungan, sosial dan politik pemerintahan	
6.	Merancang dan menyiapkan proyek investasi melalui pendekatan busines case dan pemasaran investasi	KPHP Lalan Muba, KPHP Rawas
7.	Merancang dan perencanaan peningkatan kapasitas yang diperlukan	KPHP Lakitan, KPHP Meranti, KPHP BBC
8.	Mengambil tindakan menuju kemandirian kelembagaan	

Berdasarkan Tabel 8 di atas, untuk kondisi saat ini terdapat 3 (Tiga) unit KPH di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat didorong/ difasilitasi untuk kemandirian kelembagaannya yaitu KPHP Lakitan, KPHP Meranti dan KPHP Benakat- Bukit Cogong.

#### D. Organisasi KPH ke Depan

Beberapa hal penting yang dicatat dan menjadi masukan untuk perbaikan KPH Sumatera Selatan dipaparkan pada hari ketiga tanggal 27 Mei 2016. Usulan konsep terkait pengelolaan KPH baik pada tingkat tapak maupun keterhubungan antara KPH dengan Dinas Kehutanan Provinsi dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

1. Beberapa KPH sebanyak 5 KPH Sumatera Selatan telah mengikuti berbagai pelatihan untuk membangun Jaringan Data Spasial Kehutanan (JDSK) yang diselenggarakan oleh Bioclime tetapi untuk implementasi masih terkendala dengan SOP yang belum dibuat oleh Dinas kehutanan Provinsi. SOP yang dibuat oleh Bioclime belum dipublikasikan tetapi secara umum telah tersedia 9 SOP untuk memasukkan data-data pada tingkat KPH.
2. Belum tersedia operator pemasuk data pada tingkat Provinsi, sehingga Dishut Provinsi Sumatera Selatan harus menyiapkan orang yang memasukkan data-data KPH. Enam KPH yang terdiri dari 1 KPHL dan 5 KPHP telah memiliki staf/ahli GIS yang menjadi operator tingkat KPH untuk mengolah data spasial di tingkat KPH. Selain enam KPH yang telah operasional terdapat empat KPH yang telah menyiapkan orang untuk menangani data-data spasial tingkat KPH. Empat KPH tersebut adalah KPHP Lalan Sembilang, KPHP Saka, KPHL Mekakau dan KPHL Bukit Nanti.
3. Struktur data/format data dan pemberian nama file telah ada standar dan templete, tetapi ke depan akan diperbaharui.
4. Selain data spasial, KPH juga dapat menampilkan laporan kegiatan, laporan periodik dan share data-data lainnya, sehingga bisa menjadi pembelajaran KPH lain.
5. GIZ LAMAI telah mealukan kegiatan di 3 Kabupaten dan telah memiliki berbagai data, sehingga dapat di link dengan data KPH Se Sumatera Selatan. Dapat diakses [data.provsumsel.co.id](http://data.provsumsel.co.id).
6. Para kepala KPH se Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk membangun Jaringan Data Spasial Kehutanan dengan menyediakan personilnya.
7. Website KPH se Sumatera Selatan tidak hanya menampilkan data-data KPH tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dengan forum KPH Se Sumatera Selatan.

Diskusi yang berkembang pada saat presentasi dan Sesi Diskusi ORTALA

1. Organisasi KPH berbentuk UPTD, dan berharap UPTD tipe A.
2. Struktur organisasi KPH mengacu pada struktur organisasi pada Kementerian LHK dari dua Ditjen BPDAS-HL dan BPHP

3. Jumlah Unit KPH sementara akan tetap 24 unit untuk mengurangi kekisruhan di tingkat KPH dan pengelolaan SK KPH
4. Perlu dipikirkan dan dirumuskan standar kompetensi untuk kepala KPH dan jabatan-jabatan lainnya dan level KPH untuk pengembangan jenjang karir.
5. Pemberlakuan UU ASN maka ada peluang untuk merekrut pegawai kontrak dengan kompetensi dan profesionalisme tertentu.

Wacana untuk menggabung KPH-KPH dengan luasan kecil, karena jika ada 24 unit KPH ada 24 UPTD terlalu banyak jadi bisa digabung 1 kabupaten/kota bisa 1-3 unit saja tapi tidak merubah SK yang sudah disahkan melalui SK Gubernur dan atau Kabupaten.

## **BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **3.1. Kesimpulan dari Rapat Koordinasi**

Hasil analisa dengan pengelompokkan 3 tipologi KPH Sumatera Selatan, seperti: Tipologi 1 – KPH sudah operasional yaitu telah memiliki dokumen RPHJP dan Rencana Bisnis serta sebagian program dan kegiatan telah dilaksanakan, Tipologi 2 – KPH setengah operasional yaitu KPH yang hingga saat ini telah menyusun RPHJP, tetapi masih proses untuk mendapat pengesahan dan tipologi – 3 KPH belum memiliki RPHJP memperlihatkan bahwa saat ini masih dalam tahap berkembang dan menunggu kepastian bentuk kelembagaan dengan adanya UU No 23 tahun 2014. Namun demikian pada tipologi 1 dan tipologi 2 sudah bisa menjalankan program teknis dengan sumber pendanaan dan bimbingan dari APBN dan APBD.

KPH yang masuk dalam kategori tipologi 1 sudah memiliki rencana bisnis kearah kemandirian dari rencana kolaborasi bersama masyarakat maupun pihak swasta. Arah ini terlihat melalui rencana pembuatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) walaupun masih terkendala kepastian bentuk kelembagaan yang akan dimulai dari bulan Oktober 2016.

### **3.2. Saran**

Beberapa saran yang bisa disampaikan untuk pembangunan KPH Sumatera Selatan antara lain:

1. Mendorong pembuatan Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) di satu KPHP percontohan
2. Mendukung Dishut dan KPH membuat kajian bentuk kelembagaan yang cocok (UPTD/SKPD) di Sumatera Selatan yang bisa memfasilitasi sinergi RPHJP dan Rencana Bisnis
3. Mengoptimalkan dukungan Dinas Kehutanan untuk implementasi JDSK sebagai system dan alat Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dari KPH ke Dinas Kehutanan serta
4. Mengembangkan website KPH sebagai media komunikasi antar KPH di Sumatera Selatan



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Peserta Rapat Koordinasi KPH Sumatera Selatan

No	Nama	Lembaga
1	Harahab	KPHP Rawas
2	Wan Kamil	KPHP Meranti
3	Endang	Pendamping KPH/UMP
4	Neneng	KPHP Benakat-Bukit Cugong
5	David	GIZ LAMAI
6	Edi Cahyono	KPHP Lakitan
7	Hendriyadi	KPHP Lempuing
8	Nur	UMP
9	Hesti Astiana	Pendamping KPH
10	Gunawan	KPHP Subanderiji-Martapura
11	Agus Mustopa	KPHP Unit II Lalan Sembilang
12	Junaidi	KPHP Unit XXIII Sungai Lumpur
13	Hotman	KPHP Lalan Mendis
14	Edi Warsa	KPHP Unit XXIV Sungai Batang-Riding
15	Jamroni	KPHP XIX Saka
16	Antaria Marsaga	KPHP Lalan Sembilang
17	Susilo	KPHP Mesuji Unit XXII
18	Devi	Pendamping KPH/UMP
19	Lulu Yuningsih	Um Palembang
20	Udi Setyawan	KPHL Banyuasin
21	Heety Dian Yunit	KPHL Dempo
22	Afrizal	KPHL Bukit Nanti OKU
23	Ketut Heriyanto	KPHL Bukit Nanti OKUS
24	Agust Dipa Candra	KPHL Mekakau
25	Doni Kumaini	KPHL Peraduan Gistang
26	S. Anang Wahyudi	KPHL Ogan Ulu
27	Noril Milantara	Um Palembang
28	Atep Edi Hikmana	BPKH
29	Jun Harbi	Um Palembang
30	Dwi Oktaria	BUNSRI
31	Mita Ramayati	Lamai CCROM IPB
32	Yun Yudiarti	IPB
33	Haryanto R. Putro	IPB
34	Bramastyo Nugroho	CCROM-IPB
35	Panji	Dinas Kehutanan Provinsi
36	M. Ardison	Dinas Kehutanan Provinsi
37	Tumbur Marpaung	Dinas Kehutanan Provinsi
38	Henrizal	Dinas Kehutanan Provinsi
39	Bonaventura Firman	Dinas Kehutanan Provinsi
40	Berthold Haasler	GIZ BIOCLIME
41	M. Sidiq	GIZ BIOCLIME
42	Dudy Nugroho	GIZ BIOCLIME
43	Nyimas Wardah	GIZ BIOCLIME
44	Ifran Imanda	GIZ LAMAI

Published by:

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Kantor Terdaftar  
Bonn dan Eshborn, Jerman

BIOCLIME  
Biodiversity and Climate Change

Kantor Jakarta:  
GIZ ICCTF/GE LAMA I  
Gedung Wisma Bakrie II. 5th Floor Ruang ICCTF  
Jl. HR Rasuna Said Kavling B-2  
Jakarta Selatan 12920  
Tel.: +62-21-9796 7614  
Fax.: +62-21-5794 5739

Kantor Palembang :  
Jl. Jend. Sudirman No. 2837  
KM. 3,5 Palembang  
Tel.: +62-711-353176  
Fax.: +62-711-353176